

BAB V Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti dinamika relasi kuasa antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kedua instansi tersebut memiliki peran yang berbeda tetapi saling terkait. Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat KIS. Relasi kuasa antara kedua instansi ini berjalan secara intensif dan harmonis, di mana Dinas Kesehatan menetapkan peserta program berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial. Kolaborasi ini memastikan bahwa penerima KIS benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang berhak sesuai ketentuan program.

Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan anggaran yang membatasi jumlah penerima manfaat dan potensi konflik dalam proses penetapan peserta KIS. Meski demikian, sinergi yang baik antara kedua instansi berhasil meminimalisir kendala tersebut, sehingga implementasi Program KIS di Kabupaten Banyumas dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program KIS sangat bergantung pada koordinasi dan relasi kuasa yang seimbang antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.